

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman disetiap daerahnya. Perbedaan ciri wilayah merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh negara Indonesia. Perbedaan ini menimbulkan kemampuan daerah dalam bertumbuh dari waktu ke waktu, maka dari hal tersebut timbulah masalah ketimpangan antar daerah terlebih dengan pada awal pemerintahan adanya kebijakan sentralisasi yang membuat pengaruh terhadap ketimpangan terutama pada daerah yang kaya akan sumber daya alamnya (Rizfal Efriadi, 2015).

Pada tahun 1966, pemerintah Orde Baru dari mobilitas massa atas dasar partai perlahan dari waktu ke waktu digantikan oleh birokrasi. Pada masa tersebut banyak keberhasilan yang dicapai terutama di bidang ekonomi. Dalam struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas dibentuk Undang-Undang Dasar No.5 Tahun 1974 tentang inti dari pemerintah daerah. Konsep desentralisasi ini diwujudkan dalam rangka memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Susi Suhendra, 2015).

Mengacu pada Undang-Undang, desentralisasi sebagai pelaksana kegiatan ekonomi di daerahnya, pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus program pembangunan yang nantinya memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan yang secara mandiri dan tanggung jawab akan pengelolaan daerahnya kecuali urusan pemerintahan pusat seperti politik luar negeri, yustisi, moneter, nasional, agama, dan lainnya (Lilis Rosita, 2007).

Beberapa keuntungan dari kebijakan desentralisasi yaitu efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintah, memungkinkan melakukan inovasi, serta meningkatkan motivasi moral, komitmen dan produktivitas. Bagi negara-negara berkembang, jalan desentralisasi ditempuh untuk melepaskan diri dari perangkap pengelolaan pemerintahan yang tidak efektif dan tidak efisien,

ketidakstabilan ekonomi makro, dan tidak memadainya pertumbuhan ekonomi. Kebijakan desentralisasi oleh pemerintah pusat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pengelolaan rumah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, daerah mendapat kesempatan untuk mengelola rumah tangganya sendiri untuk mencapai kemandirian daerah. Dengan wewenang yang dimiliki, pemerintah daerah diharapkan akan mampu mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada di setiap daerah karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kondisi serta apa yang dibutuhkan daerah. Berdasarkan pandangan ini, pemerintah daerah dipercaya bisa mengalokasikan dana kepada masing-masing sektor dalam ekonomi secara lebih efektif dan efisien daripada pemerintah pusat (Bayu Kharisma, 2013).

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki fungsi memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan dana dalam kegiatan otomi daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing sebagai wujud desentralisasi. Berbeda dengan pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil memiliki fungsi mengurangi ketimpangan segi fiskal antara pemerintahan daerah satu dengan daerah lainnya. Pada dasarnya yang diharapkan menjadi sumber utama pelaksanaan pembiayaan adalah Pendapatan Asli Daerah dalam desentralisasi fiskal. Dalam demikian Dana Alokasi Umum diharapkan hanya menjadi penyeimbang apabila terjadi ketimpangan fiskal (Anton Kurniawan, 2014).

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2017

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
Surabaya	4,035,649,478,398	3,839,158,391,769	4,212,569,176,921
Malang	61,887,704,825	394,872,007,215	426,295,772,668
Sidoarjo	1,266,786,727,409	1,203,782,695,817	1,310,069,237,292
Lamongan	321,667,133,176	317,130,114,465	413,033,141,634
Gresik	799,884,870,103	924,976,298,356	949,661,505,000

Sumber : APBD Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017

Pada tabel diatas bahwa Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur menunjukkan jumlah yang besar terutama di Kabupaten/Kota yang menjadi

wilayah yang makmur dan sokongan sumber daya ekonomi serta lembaga yang lebih baik. Maka dari tabel terlihat jelas bahwa kemampuan daerah dalam bertumbuh sangat berbeda dari situ permasalahan ketimpangan pendapatan terjadi.

Tabel 1.2
Dana Bagi Hasil Tahun 2015-2017

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
Surabaya	230,261,248,683	385,205,000,630	463,766,025,103
Malang	126,719,045,923	142,297,873,593	150,729,265,000
Sidoarjo	121,320,183,033	208,034,752,627	155,827,511,627
Lamongan	95,412,623,093	111,259,668,234	98,305,439,000
Gresik	119,825,600,654	173,469,042,000	184,818,444,461

Sumber : APBD Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017

Dari tabel diatas dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam tujuan terwujudnya system desentralisasi berdasarkan angka presentase. Jawa timur dikenal memiliki sumber daya yang cukup tinggi namun keberadaannya tidak tersebar dengan baik di seluruh daerahnya. Hal tersebut mempengaruhi jumlah angka dana bagi hasil yang diterima masing masing daerah. Pada kota Surabaya adalah penerima yang paling besar dengan diikuti kota lainnya yang mungkin tidak memiliki angka yang signifikan perbedaannya.

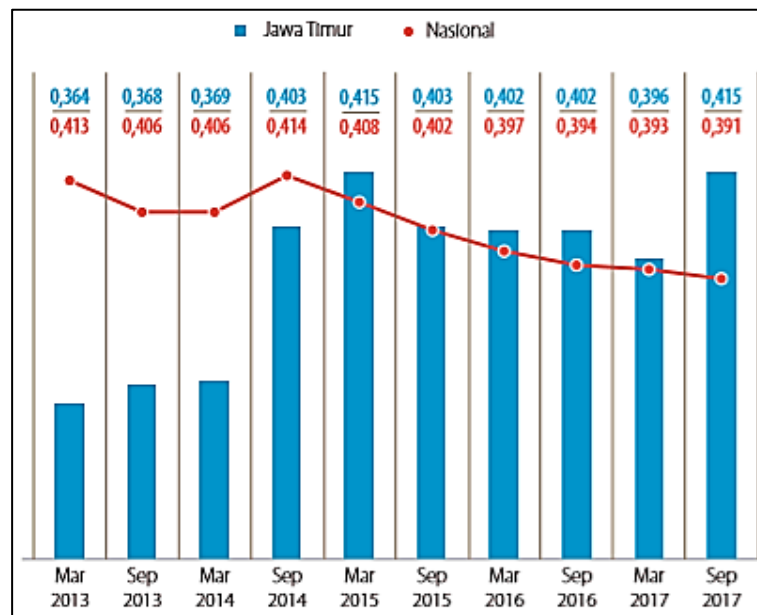
Tabel 1.3
Dana Alokasi Umum Tahun 2015-2017

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
Surabaya	1,147,385,486,000	1,233,380,404,000	1,345,040,944,092
Malang	1,613,161,777,000	1,613,161,777,000	1,694,884,660,000
Sidoarjo	1,206,659,789,000	1,225,261,302,000	1,314,001,701,000
Lamongan	1,064,300,915,000	1,166,655,654,000	1,166,655,654,000
Gresik	873,265,959,000	923,469,024,000	923,469,024,000

Sumber : APBD Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017

Dari tabel diatas menunjukkan Dana Alokasi Umum yang merupakan *Unconditional Grant* yang berarti dana transfer yang berasal dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lainnya dan digunakan untuk tujuan yang

luas. DAU yang digunakan di Indonesia mengandung *hold harmless* yang artinya angka yang diterima setiap daerah tidak akan berjumlah lebih kecil daripada tahun anggaran sebelumnya. Dari tabel tidak ada penurunan angka walaupun pada kota Lamongan dan Gresik pada tahun 2016-2017 menunjukkan angka tetap tidak ada perubahan.



Gambar 1.1

Perkembangan Indeks Gini di Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2017

Sumber : Indeks Gini Badan Pusat Statistik Tahun 2013-2017

Pada September 2015, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,403 jumlah ini lebih tinggi dibanding 2 tahun berikutnya yaitu sebesar 0,402. Berbeda dengan tahun 2016-2017 menunjukkan angka tetap dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,402. Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen, artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang.

Dalam jurnalnya, H.T Oshima dalam Suseno (1990 : 120) kriteria klasifikasi penggunaan koefisien Gini Ratio adalah sebagai berikut: Pertama, bila koefisien Gini lebih kecil dari 0,30 : termasuk distribusi ketimpangan rendah (ringan). Kedua, bila koefisien Gini berkisar antara 0,31 - 0,40 : termasuk kondisi ketimpangan sedang. Ketiga, bila koefisien Gini lebih besar dari 0,40 : termasuk

kondisi ketimpangan tinggi. Sementara, tingkat ketimpangan berdasarkan ukuran ini dibagi menjadi tiga kategori, yakni tinggi persentase pengeluaran kelompok penduduk 12-40 persen, ketimpangan sedang berkisar antara 12-17 persen, dan ketimpangan rendah ketika angkanya berada di atas 17 persen (Dosri Yoki, 2011).

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengetahui pengaruh perubahan kebijakan yang berawal dari sentralisasi menjadi desentralisasi, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah pada skripsi sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini ?
2. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini ?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan sebagai pembelajaran dan sarana untuk mendalami pengetahuan mengenai pengaruh desentralisasi terhadap Ketimpangan Pendapatan.
2. Diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

3. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam melihat pengaruh desentralisasi fiskal guna untuk pemerataan pendapatan di Jawa Timur

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis dan Sumber

Jumlah sampel dalam penelitian ini ada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan periode penelitian dari tahun 2015-2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Indeks Gini yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur (bappeda.jatimprov.go.id).

1.5.2 Metode Analisis

Menurut Muhammad Arif dan Rossy Agustin Wicaksana (2017), Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur pada tahun 2015-2017 dengan menggunakan model analisis sebagai berikut :

$$GINI_t = \beta_0 + \beta_1 \text{LogPAD}_{it} + \beta_2 \text{LogDAU}_{it} + \beta_3 \text{LogDBH}_{it} + e_{it}$$

Di mana:

LogGINI	= Ketimpangan (Dalam Persen)
LogPAD	= Pendapatan Asli Daerah (Dalam Milyar)
LogDAU	= Dana Alokasi Umum (Dalam Milyar)
LogDBH	= Dana Bagi Hasil (Dalam Milyar)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_3$	= Koefisien variabel bebas
e	= <i>Error Term</i> (faktor kesalahan)
i	= Observasi ke i
t	= Tahun ke

1.5.3 Prosedur Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak *Eviews*. Langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi :

- *Pooled Least Square (PLS)/ Common Effect Model (CEM)*

Metode ini merupakan metode yang paling sederhana yaitu dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dalam estimasinya diasumsikan bahwa setiap unit individu memiliki intersep dan *slope* yang sama dan hasilnya akan berlaku untuk setiap individu (Juanda & Junaidi, 2012).

- *Fixed Effect Model* (FEM)

Model *Fixed Effect* atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV) memperkenankan heterogenitas antar subjek dengan anggota setiap entitas nilai intersep berbeda. Model FEM mampu menunjukkan konstanta yang berbeda di masing-masing wilayah, terkadang dapat menunjukkan koefisien besarnya pengaruh masing-masing variabel di wilayah yang berbeda (Gujarati, 2012).

- *Random Effect Model* (REM)

Pada metode REM, parameter yang berbeda antarwilayah ataupun antar waktu dimasukkan ke dalam error. Dengan model REM dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan semakin efisien. Untuk mengetahui apakah model REM lebih baik daripada model PLS, maka dapat digunakan uji Lagrange Multiplier yang dikembangkan oleh Bruesch-Pagan. Pengujian didasarkan pada nilai residual dari model PLS (Juanda & Junaidi, 2012).

1.5.4 Pemilihan Model Data Panel

Metode yang ditawarkan dalam regresi data panel dapat dipilih dengan beberapa uji yang tepat, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan sebagai berikut (Rimbani, 2016) :

- Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling baik antara *Common* atau *Pooled* dan *Fixed Effect* yang akan digunakan dalam mengestimasi data panel.

- Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM).

- Uji F (simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

- Interpretasi R^2

Uji R^2 mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variabel independen. Besarnya derajat determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0, maka semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika uji derajat determinasi mendekati 1, maka semakin kuat pengaruh variabel tersebut dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen.

- Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk melihat tingkat signifikansi dari setiap variabel independen apakah memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri beberapa bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya sebagian besar menyempurnakan usulan penelitian, memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini merupakan penjelasan mengenai landasan teori yang dijadikan penunjang dan acuan penelitian, penelitian terdahulu yang seragam, kerangka pikiran dan hipotesis yang diajukan pada penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Adapun unsur-unsur yang dibahas yakni : objek penelitian, alat dan model analisis, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan hasil dari penelitian seperti hasil estimasi, intepretasi pengaruh variabel independen, dan intepretasi ekonomi. Pada akhirnya pada bab ini merupakan inti dalam penelitian, sebab berisi analisis data-data yang telah dikumpulkan dengan alat dan metode yang disiapkan.

BAB V : SARAN DAN KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan mengenai saran dan kesimpulan yang diperuntukkan pihak yang memiliki keterkaitan, sehingga menjadi bahan referensi, acuan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan mengungkapkan keterbatasan dalam penelitian ini.